



P E M E R I N T A H
PROVINSI RIAU

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU

TAHUN 2020



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Daftar Isi | i |
| Daftar Gambar | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD PROVINSI RIAU TAHUN 2018 | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD | 8 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD | 30 |
| 2.3. Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi | 31 |
| 2.4. Review Rancangan Awal RKPD | 33 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 45 |
| BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 46 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD | 52 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 54 |
| BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah | 61 |
| BAB V. PENUTUP | 70 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja SKPD Sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008..... | 2 |
|--|---|

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD Dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2019 Provinsi Riau ... | 9 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Riau | 30 |
| Tabel 2.3 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Riau | 34 |
| Tabel 3.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPKAD..... | 48 |
| Tabel 3.2 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD..... | 53 |
| Tabel 3.3 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Riau..... | 56 |
| Tabel 4.1 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju 2021..... | 62 |

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2019 – 2024 yang merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memuat program, kegiatan, target, indikator *outcome*, indikator *output*, dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Penyusunan dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dilakukan untuk melaksanakan dan mewujudkan implementasi *good financial governance* terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi, perencanaan, dan manajemen keuangan dan aset daerah yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai implementasi terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Informasi.

Dengan ditetapkannya Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan untuk menyusun rencana Kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau dalam meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2019 – 2024.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



SYAHRIAL ABDI, AP. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 199503 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan good governance and clean government, menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) dimaksudkan terutama upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 dapat terwujud.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan tata cara dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah baru terbentuk pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelola keuangan dan aset daerah dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. BPKAD selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur organisasi BPKAD terbentuk dari penggabungan fungsi Biro Keuangan Sekretariat Daerah dan sebagian fungsi pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2019 menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2020.

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2024 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau, adalah :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.;

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur tersebut di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-5 (lima) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi tersebut adalah “Meningkatkan kinerja ASN dan Pelayanan Publik”, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tujuan strategis yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi**”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau;
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja BPKAD Tahun 2020, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;
14. Rencana Awal Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Rancangan Awal Renja ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam mencapai prioritas pembangunan tahun 2020.

Tujuan kegiatan penyusunan Rancangan Awal Renja BPKAD Provinsi Riau adalah;

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 bagi setiap bagian dan bidang di lingkungan BPKAD Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II. HASIL EVALUASI HASIL RENJA BPKAD PROVINSI RIAU TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra BPKAD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja BPKAD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

BAB V. PENUTUP

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja BPKAD tahun lalu (tahun 2018) dan pencapaian tahun berjalan (tahun 2019) kinerja Renstra BPKAD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi BPKAD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BPKAD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra BPKAD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan
Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2019
Provinsi Riau**

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=(10/4)* | 12 |
| 3 00 02 | URUSAN KEUANGAN | | | | | | | | | | |
| 3 00 02 02 | BPKAD | | | | | | | | | | |
| 3 00 02 02 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik | | | | | | | | | |
| 3 00 02 02 01 001 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | 8.900 | 5.500 | 2.000 | 1.850 | 92,50 | 650 | 8.000 | 89,88 | BPKAD |
| 3 00 02 02 01 002 | Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air Dan Listrik | Rentang waktu penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik | 42 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 85,71 | |
| 3 00 02 02 01 006 | Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaran dinas/operasional yang dipelihara | 75 | 34 | 17 | 17 | 100 | 19 | 69 | 92 | |
| 3 00 02 02 01 008 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah tenaga dan jenis kebersihan kantor yang disediakan | 48 | 17 | 12 | 12 | 100 | 12 | 41 | 85,41 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=(10/4)* | 12 |
| 3 00 02 02 01 012 | Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik | 60 | 36 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 60 | 100 | BPKAD |
| 3 00 02 02 01 015 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 60 | 36 | 4 | 4 | 100 | 12 | 52 | 86,6 | |
| 3 00 02 02 01 017 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 48.520 | 14.600 | 12.000 | 11.000 | 91,6 | 17.225 | 42.825 | 88,26 | |
| 3 00 02 02 01 018 | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah | 3.000 | 1.900 | 600 | 500 | 83,33 | 500 | 2.900 | 96,67 | |
| 3 00 02 02 01 019 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor | 24 | 0 | 8 | 8 | 100 | 12 | 20 | 83,33 | |
| 3 00 02 02 01 024 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD | jumlah barang dan jasa pelayanan administrasi SKPKD | 275 | 143 | 55 | 53 | 96,36 | | 196 | 71,27 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=(10/4)* | 12 |
| 3 00 02 02 01 025 | Kegiatan Pengelolaan Arsip SKPKD | Jumlah Penataan/Pengelolaan Arsip SKPKD | 65.000 | 59.000 | 2.000 | 1.500 | 75 | 1000 | 61.500 | 94,62 | BPKAD |
| 3 00 02 02 02 007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 235 | 192 | 50 | 40 | 80 | 66 | 232 | 98,72 | |
| 3 00 02 02 02 009 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 137 | 17 | 20 | 20 | 100 | 58 | 95 | 69,34 | |
| 3 00 02 02 02 022 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan Gedung Kantor yang dipelihara | 1,300 | 400 | 450 | 450 | 100 | 450 | 1300 | 100 | |
| 3 00 02 02 02 024 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | |
| 3 00 02 02 02 028 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 801 | 434 | 50 | 50 | 100 | 317 | 801 | 100 | |
| 3 00 02 02 02 043 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang direhab | 500 | 0 | 250 | 112 | 44,80 | 250 | 362 | 72,40 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=(10/4)* | 12 |
| 3 00 02 02 02 062 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala genset | Jumlah genset yang dipelihara | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 | | 4 | 80 | BPKAD |
| 3 00 02 02 02 129 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Air dan Telepon | Jumlah Jaringan Listrik, Air dan Telepon yang dipelihara | 6 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 100 | |
| 3 00 01 01 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur | | | | | | | | | |
| 3 00 01 01 03 002 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang diadakan | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 100 | |
| 3 00 01 01 03 005 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan | 450 | 150 | 360 | 150 | 42 | 0 | 300 | 67 | |
| 3 00 02 02 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ketepatan penyampaian laporan | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=(10/4)* | 12 |
| 3 00 02 02 05 001 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 90 | 10 | 50 | 50 | 100 | 10 | 70 | 78 | BPKAD |
| 3 00 02 02 05 012 | Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur | Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan fisik dan mental | 240 | 0 | 120 | 49 | 40,83 | 120 | 169 | 70,42 | |
| 3 00 02 02 05 204 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah peserta Bimtek | 185 | 90 | 90 | 5 | 5,56 | 90 | 185 | 100 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=(10/4)* | 12 |
| 3 00 02 02 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan | | | | | | | | | |
| 3 00 02 02 06 001 | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | 22 | 7 | 5 | 5 | 100 | 5 | 17 | 77 | BPKAD |
| 3 00 02 02 06 013 | Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua | Jumlah SDM akuntansi yang ditingkatkan | 434 | 228 | 100 | 100 | 100 | 100 | 428 | 98,62 | |
| 3 00 02 02 06 014 | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan keuangan yang disusun | 12 | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 12 | 100 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=(10/4)* | 12 |
| 3 00 02 02 06 120 | Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | 240 | 0 | 80 | 80 | 100 | 80 | 160 | 66,67 | BPKAD |
| 3 00 02 02 15 | Program Pengembangan Data/Informasi | Persentase ketersediaan data/informasi Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas | | | | | | | | | |
| 3 00 02 02 15 006 | Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan | Frekuensi mengikuti pameran | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 3 00 02 02 21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas | | | | | | | | | |
| 3 00 02 02 21 016 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | Jenis dokumen yang disusun | 8 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 3 | 00 | 02 | 02 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah BUMD sehat | | | | | | | | | | |
| 3 | 00 | 02 | 02 | 15 | 001 | Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja | Jenis ASB yang disusun | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | - | 20 | 100 | |
| 3 | 00 | 02 | 02 | 15 | 002 | Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga | Jenis standar satuan harga yang disusun | 1.200 | 300 | 300 | 250 | 83 | 200 | 750 | 63 | BPKAD |
| 3 | 00 | 02 | 02 | 15 | 014 | Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek | 1.440 | 270 | 270 | 270 | 100 | 300 | 840 | 58 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3.00.02.02.15.018 | Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah | Jenis BMD yang Dinilai | 26 | 1 | 24 | 24 | 100,00 | | 25 | 96,15 | BPKAD |
| 3.00.02.02.15.021 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah | Jumlah jasa dan tenaga administrasi pengelolaan keuangan SKPKD | 169 | 47 | 65 | 53 | 82 | 57 | 157 | 93 | |
| 3.00.02.02.15.023 | Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah | Jmlah Tenaga Administrasi dan Pengelola Keuangan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 250 | 133 | 57 | 57 | 100 | 57 | 247 | 98,80 | |
| 3.00.02.02.15.024 | Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah | Persentase data rekonsiliasi penerimaan daerah yang akurat | 500 | 48 | 100 | 80 | 80,34 | 26 | 154,34 | 30,87 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3 00 02 02 15 026 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun | 12 | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 12 | 100 | |
| 3 00 02 02 15 027 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun | 10 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 80 | BPKAD |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3 00 02 02 15 028 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD. | Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun | 10 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 80 | BPKAD |
| 3 00 02 02 15 029 | Penyediaan Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Provinsi Riau. | Jumlah tenaga akuntansi yang kompeten | 542 | 270 | 120 | 120 | 100 | 120 | 510 | 94,10 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3.00.02.02.15.030 | Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD | Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi | 56 | 51 | 2 | 2 | 100 | 2 | 55 | 98,21 | BPKAD |
| 3.00.02.02.15.032 | Kegiatan Persiapan, Pemantapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | 304 | 72 | 72 | 72 | 100 | 80 | 224 | 74 | |
| 3.00.02.02.15.033 | Kegiatan Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah | Jumlah peserta desiminasi dan sosialisasi | 400 | 338 | 2 | 2 | 100 | 2 | 342 | 85,50 | |
| 3.00.02.02.15.034 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengeloaan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Jumlah ASN yang mengikuti pengelolaan sistem informasi keuangan daerah | 11 | 5 | 6 | 6 | 100 | 0 | 11 | 100 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3.00.02.02.15.035 | Penyusunan Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | jumlah draft pergub Sisdur pengelolaan keuangan daerah | 440 | 41 | 150 | 73 | 48,67 | 220 | 334 | 75,91 | BPKAD |
| 3.00.02.02.15.036 | Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah buku RKBMD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku | 525 | 150 | 150 | 150 | 100 | 75 | 375 | 71 | |
| 3.00.02.02.15.037 | Pembuatan alas hak dan sertifikat tanah milik Pemprov Riau | jumlah tanah milik Pemerintah Provinsi Riau yang disertifikasi | 10 | 1 | 5 | 4 | 80 | 5 | 10 | 100 | |
| 3.00.02.02.15.039 | Kegiatan Pembinaan Sisdur Penatausahaan Aset milik Pemprov.Riau | Jumlah buku sisdur penatausahaan aset daerah | 141 | 41 | 100 | 100 | 100 | 0 | 141 | 100 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3.00.02.02.15.041 | Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah BMD yang diasuransikan | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 57,14 | BPKAD |
| 3.00.02.02.15.044 | Kegiatan Pengamanan Aset Milik Daerah | Jumlah aset yang diamankan | 120 | 54 | 40 | 15 | 37,50 | 40 | 109 | 90,83 | |
| 3.00.02.02.15.124 | Kegiatan Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah aset yang dinilai | 20 | 7 | 6 | 6 | 100 | 6 | 19 | 95,00 | |
| 3.00.02.02.15.125 | Kegiatan Pemeliharaan Aset Provinsi Riau | Jumlah jenis aset yang dipelihara | 23 | 11 | 6 | 6 | 100 | 6 | 23 | 100 | |
| 3.00.02.02.15.128 | Kegiatan Inventarisasi Data Aset Daerah | Jumlah data aset yang diinventarisasi | 168 | 43 | 43 | 43 | 100 | 41 | 127 | 76 | |
| 3.00.02.02.15.130 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah SDM yang menigkat kapasitasnya | 370 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 190 | 51 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3.00.02.02.15.141 | Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan daerah | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | 1000 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 600 | 60 | BPKAD |
| 3.00.02.02.15.142 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah | Jumlah Pergub Revisi Sisdur PKD | 650 | 0 | 200 | 200 | 100 | 150 | 350 | 54 | |
| 3.00.02.02.15.143 | Kegiatan Pelaksanaan Tindak Lanjut tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah | Jumlah kasus yang ditindaklanjuti | 9 | 4 | 5 | 4 | 80 | 0 | 8 | 89 | |
| 3.00.02.02.15.144 | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Gubernur tentang Pertanggungjawaban | 48 | 0 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 50 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3 00 02 02 15 160 | Kegiatan Pengelolaan Aset Provinsi Riau | Jumlah aset yang dikelola | 9 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 9 | 100 | BPKAD |
| 3 00 02 02 15 161 | Kegiatan Penyediaan Dukungan Tenaga Akutansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau | Jumlah tenaga akuntansi yang kompeten | 516 | 42 | 114 | 108 | 95 | 120 | 270 | 52 | |
| 3 00 02 02 15 163 | Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahu Berjalan Akibat Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah | Jumlah perda dan pergub yang disusun | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 100 | |
| 3 00 02 02 15 165 | Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau | Jumlah dokumen pemindahtanganan | 48 | 0 | 24 | 24 | 100 | 24 | 48 | 100 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3.00.02.02.15.166 | Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Dokumen RKBMD Pemprov Riau | 400 | 0 | 200 | 170 | 85,00 | 200 | 370 | 92,50 | BPKAD |
| 3.00.02.02.15.167 | Penyusunan Keputusan KDH Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Keputusan KDH tentang penetapan status BMD | 80 | 0 | 40 | 34 | 85,00 | 40 | 74 | 92,50 | |
| 3.00.02.02.15.168 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD | Jumlah buku Peraturan KDH Sisdur Pengelolaan BMD | 14 | 0 | 7 | 4 | 57,14 | 7 | 11 | 78,57 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3.00.02.02.15.169 | Rekonsiliasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Pembinaan Pengelolaan BMD | 24 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 8,33 | BPKAD |
| 3.00.02.02.15.170 | Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Laporan Semesteran dan Tahunan BMD | 10 | 0 | 7 | 7 | 100 | 3 | 10 | 100 | |
| 3.00.02.02.15.171 | Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Laporan hasil inventarisasi BMD Pemprov Riau | 13 | 0 | 7 | 7 | 100 | 6 | 13 | 100 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3.00.02.02.15.172 | Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Laporan Rekonsiliasi Data BMD | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 100 | BPKAD |
| 3.00.02.02.16 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota | Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu | | | | | | | | | |
| 3.00.02.02.16.007 | Kegiatan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Ranperda APBD dan perubahan APBD Kab/Kota yang dievaluasi | 120 | 72 | 24 | 24 | 100 | 24 | 120 | 100 | |
| 3.00.02.02.16.010 | Kegiatan Penyusunan Profil Keuangan Daerah | Jumlah buku profil keuangan daerah | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 3.00.02.02.16.013 | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta rakor dan sosialisasi | 580 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 340 | 59 | BPKAD |
| 3.00.02.02.16.014 | Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan Aset Kab/Kota | 12 | 0 | 12 | 12 | 100 | 0 | 12 | 100 | |
| 3.00.02.02.16.015 | Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK pertanggungjawaban APBD Kab/Kota | 24 | 0 | 12 | 10 | 83,33 | 12 | 22 | 91,67 | |
| 3.00.02.02.16.016 | Pembinaan Pertanggung Jawaban Keuangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kab/Kota yang dibina pertanggungjawaban keuangannya | 36 | 0 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 66,67 | |
| 3.00.02.02.16.017 | Pembinaan Pelaksanaan Penyusunan APBD Kabupaten/Kota | Frekuensi pelaksanaan penyusunan APBD Kab/Kota yang dibina | 24 | 0 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 100 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan | | Unit Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|-----------------------|-----|----|----|--------|-------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Realisasi Renja PD tahun 2018 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1) | tingkat capaian realisasi target Renstra (%) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 5 | 00 | 01 | 02 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 00 | 01 | 02 | 15 | 031 | Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau | Frekuensi penertiban penggunaan barang milik daerah | 42 | 18 | 12 | 12 | 100 | 12 | 42 | 100.00 | BPKAD |
| 5 | 00 | 01 | 02 | 15 | 079 | Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Internal dan Pembinaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau | Frekuensi penertiban penggunaan barang milik daerah | 22 | 2 | 5 | 5 | 100 | 5 | 12 | 55 | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Provinsi Riau dalam menyusun program kegiatan. Indikator kinerja juga digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif oleh karena itu dalam menetapkan rencana kerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 harus mengacu pada tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Indikator kinerja BPKAD Provinsi Riau yang mendukung dan mengacu tujuan dan sasaran RPJMD untuk lima tahun kedepan 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD
Provinsi Riau

| No | Indikator | SPM | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | catatan Analisis |
|-----|--|--|--|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|-------|------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau | APBD/APBD-P Provinsi Riau berkualitas | Persentase jumlah SKPD yang penyusunan anggarannya sesuai ketentuan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | Persentase Penatausahaan Keuangan Provinsi Riau sesuai ketentuan | Persentase jumlah SKPD yang penatausahaan APBD/APBD-P sesuai ketentuan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau Sesuai Ketentuan | Persentase jumlah barang milik daerah SKPD yang terkelola sesuai ketentuan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau sesuai Ketentuan | Persentase jumlah laporan keuangan SKPD sesuai dengan SAP | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase penyampaian APBD/APBD-P SKPD Kab/Kota Sesuai Ketentuan | Persentase jumlah SKPD yang penyusunan Ranperdapertan ggunjawaban pelaksanaan APBD sesuai pedoman evaluasi mendagri | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab/Kota | Persentase Kab/Kota yang Pengelolaan Keuangan dan Asetnya baik | Jumlah Kab/Kota yang pengelolaan keuangan dan asetnya baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.3. Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2019-2024 Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan;
2. Kapasitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
3. Kualitas dan efektifitas pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi belum maksimal;
4. Kualitas dan efektifitas perbendaharaan dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis, serta penerapan *treasury single account/TSA*, belum optimal;
5. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem teknologi informasi perencanaan, pelaporan, serta pengelolaan barang , belum maksimal;

6. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, belum optimal;
7. Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota belum optimal;
8. Pengelolaan barang milik daerah masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan azas fungsi, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Berdasarkan gambaran permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang akan dikelola berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau meliputi 3 (tiga) perspektif, yaitu :

1. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran.

Isu strategis dalam perspektif inovasi dan pembelajaran meliputi pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika, peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan aset daerah, dan restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Perspektif Proses Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Isu strategis dalam perspektif internal pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah, pengembangan sistem teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual), pelayanan perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi.

3. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholders.

Isu strategis dalam perspektif pemangku kepentingan/stakeholders adalah peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi manajerial keuangan dan aset daerah, peningkatan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, dan peningkatan inventarisasi dan administrasi penatausahaan, pengelolaan/pemeliharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban aset milik Pemerintah Provinsi Riau.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh undang-undang no 25 tahun 2004 kepada pemerintah daerah untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Adapun Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Riau

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|--|-----------|--|----------------|-------------------------|--|-----------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pekanbaru | Jumlah surat yang dikirim | 1.000 surat | 21.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pekanbaru | Jumlah surat yang dikirim | 1.000 surat | 21.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pekanbaru | Jumlah rekening yang dibayar | 48 rekening | 804.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pekanbaru | Jumlah rekening yang dibayar | 48 rekening | 804.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pekanbaru | Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 326.075 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pekanbaru | Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 326.075 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Pekanbaru | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 21 unit | 347.407 | Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Pekanbaru | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 21 unit | 347.407 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-----------------------|--|----------------|-------------------------|---|-----------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pekanbaru | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan | 55 Jenis | 828.640 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pekanbaru | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan | 55 Jenis | 828.640 | |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Pekanbaru | Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan | 30 Jenis | 534.100 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Pekanbaru | Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan | 30 Jenis | 534.100 | |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pekanbaru | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 13 Jenis | 62.750 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pekanbaru | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 13 Jenis | 62.750 | |
| 8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Pekanbaru | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 14,100 Porsi | 354.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Pekanbaru | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 14,100 Porsi | 354.000 | |
| 9 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Dalam dan luar daerah | Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 500 kali | 1.050.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Dalam dan luar daerah | Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 500 kali | 1.050.000 | |
| 10 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor | Pekanbaru | Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan | 80 OB | 2.944.500 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor | Pekanbaru | Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan | 80 OB | 2.944.500 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|--|-----------|--|----------------|-------------------------|--|-----------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 11 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Pekanbaru | Jumlah tenaga satpam yang disediakan | 120 OB | 233.600 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Pekanbaru | Jumlah tenaga satpam yang disediakan | 120 OB | 233.600 | |
| 12 | Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD | Pekanbaru | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD | 80 Persen | 38.677 | Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD | Pekanbaru | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD | 80 Persen | 38.677 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Pekanbaru | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan | 10 Unit | 75.000 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Pekanbaru | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan | 10 Unit | 75.000 | |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pekanbaru | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 60 Unit | 336.475 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pekanbaru | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 60 Unit | 336.475 | |
| 3 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pekanbaru | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | 50 Unit | 344.200 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pekanbaru | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | 50 Unit | 344.200 | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pekanbaru | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 400 Unit | 280.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pekanbaru | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 400 Unit | 280.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---|-----------|--|----------------|-------------------------|---|-----------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Program Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P) | Pekanbaru | Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS Perubahan APBD | 4 dokumen | 467.492 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P) | Pekanbaru | Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS Perubahan APBD | 4 dokumen | 467.492 | |
| 2 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Pekanbaru | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran APBD | 2 dokumen | 853.592 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Pekanbaru | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran APBD | 2 dokumen | 853.592 | |
| 3 | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan | Pekanbaru | Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah | 2 Pergub | 110.360 | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan | Pekanbaru | Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah | 2 Pergub | 110.360 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|--|----------------------|-------------------------|--|-----------|--|----------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 4 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD. | Pekanbaru | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 dokumen | 873,089 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD. | Pekanbaru | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 dokumen | 873,089 | |
| 5 | Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah | Pekanbaru | Jumlah regulasi yang disusun; Jumlah peserta desminasi dan sosialisasi; | 2 regulasi; 2 Orang; | 335,485 | Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah | Pekanbaru | Jumlah regulasi yang disusun; Jumlah peserta desminasi dan sosialisasi; | 2 regulasi; 2 Orang; | 335,485 | |
| 6 | Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD | Pekanbaru | Jumlah Peserta Koordinasi dan Evaluasi Anggaran BLUD Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau | 60 Peserta | 197,456 | Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD | Pekanbaru | Jumlah Peserta Koordinasi dan Evaluasi Anggaran BLUD Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau | 60 Peserta | 197,456 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-----------|---|----------------|-------------------------|---|-----------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 7 | Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai | Pekanbaru | Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai | 300 Orang | 132,445 | Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai | Pekanbaru | Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai | 300 Orang | 132,445 | |
| 8 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah | Pekanbaru | Jumlah laporan data penerimaan daerah | 12 Laporan | 216,006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah | Pekanbaru | Jumlah laporan data penerimaan daerah | 12 Laporan | 216,006 | |
| 9 | Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua | Pekanbaru | Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan | 125 Orang | 209,245 | Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua | Pekanbaru | Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan | 125 Orang | 209,245 | |
| 10 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Pekanbaru | Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 2 Dokumen | 521,214 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Pekanbaru | Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 2 Dokumen | 521,214 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|---|------------------------|-------------------------|--|-----------|---|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 11 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan | Pekanbaru | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | 14 Laporan | 408,686 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan | Pekanbaru | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | 14 Laporan | 408,686 | |
| 12 | Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi | Pekanbaru | Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor | 43 Entitas Akuntansi | 191,332 | Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi | Pekanbaru | Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor | 43 Entitas Akuntansi | 191,332 | |
| 13 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Pekanbaru | Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi; | 12 Kab/Kota; 12 Rakor; | 121,174 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Pekanbaru | Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi; | 12 Kab/Kota; 12 Rakor; | 121,174 | |
| 14 | Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Pekanbaru | Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi | 3 Aplikasi | 745,403 | Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Pekanbaru | Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi | 3 Aplikasi | 745,403 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|--|----------------|-------------------------|--|-----------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 15 | Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Pekanbaru | Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 24 SK | 480,172 | Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Pekanbaru | Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 24 SK | 480,172 | |
| 16 | Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Pekanbaru | Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 12 SK | 329,796 | Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Pekanbaru | Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 12 SK | 329,796 | |

| | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---|-----------|--|----------------|-------------------------|---|-----------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Program Pembinaan Dan Pengelolaan Aset Daerah | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau | 5 Dokumen | 219,108 | Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau | 5 Dokumen | 219,108 | |
| 2 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD | Pekanbaru | Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD | 2 Dokumen | 119,033 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD | Pekanbaru | Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD | 2 Dokumen | 119,033 | |
| 3 | Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD | 7 Dokumen | 127,300 | Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD | 7 Dokumen | 127,300 | |
| 4 | Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | 7 Buku | 341,746 | Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | 7 Buku | 341,746 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-----------|--|------------------------|-------------------------|---|-----------|--|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5 | Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah | 2 Laporan | 105,938 | Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah | 2 Laporan | 105,938 | |
| 6 | Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Pekanbaru | Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum | 6 Jenis | 298,106 | Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Pekanbaru | Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum | 6 Jenis | 298,106 | |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Pekanbaru | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara | 6 Lokasi | 371,192 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Pekanbaru | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara | 6 Lokasi | 371,192 | |
| 8 | Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan; Jumlah lokasi BMD yang ditertibkan; | 3 Jenis BMD; 3 Lokasi; | 167,900 | Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan; Jumlah lokasi BMD yang ditertibkan; | 3 Jenis BMD; 3 Lokasi; | 167,900 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|---|----------------|-------------------------|--|-----------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 9 | Penilaian Barang Milik Daerah | Pekanbaru | Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi | 12 Kab/Kota | 345,636 | Penilaian Barang Milik Daerah | Pekanbaru | Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi | 12 Kab/Kota | 345,636 | |
| 10 | Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi | 12 Kab/Kota | 96,300 | Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi | 12 Kab/Kota | 96,300 | |
| 11 | Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah peserta | 150 Peserta | 101,218 | Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | Jumlah peserta | 150 Peserta | 101,218 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan rangkaian pengelolaan keuangan daerah sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Fungsi yang erat kaitannya dengan usulan program dan kegiatan masyarakat adalah pengelolaan keuangan belanja hibah dan bantuan sosial pada fungsi PPKD. Belanja hibah dan bantuan sosial dimaksudkan untuk menampung usulan/aspirasi pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan Undang Undang 23 Tahun 2011 dan Permendagri 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Usulan kegiatan masyarakat tersebut disampaikan dalam bentuk proposal dan rekomendasi dari SKPD terkait untuk diusulkan pada mata anggaran belanja PPKD. Selain dari pengelolaan belanja PPKD tersebut, BPKAD juga mulai melaksanakan tugas-tugas fasilitasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Program Kemitraan antara Pemerintah dengan pihak swasta/BUMD di lingkungan Provinsi Riau dalam bentuk mendukung kepentingan sosial masyarakat dan kontribusi terhadap pembangunan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar mampu meningkat ke jenjang negara maju, pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal utamanya adalah:

- (1) Adanya normalisasi suku bunga di negara-negara maju, khususnya kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve System (The Fed), besar kemungkinan bisa menekan nilai tukar Rupiah.
- (2) Adanya risiko eskalasi perang dagang antara AS dengan China.
- (3) Penurunan harga minyak dunia, walau penurunan tersebut bisa menurunkan CAD, tetapi jika terlalu tajam dan persisten bisa berpengaruh negatif pada ekspor Indonesia dan penerimaan Pemerintah.
- (3) perubahan iklim global.
- (4) Revolusi Industri 4.0.

Sedangkan tantangan internal utamanya berpusat pada mewujudkan manfaat dari bonus demografi yang hanya terjadi satu kali dalam suatu negara yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2035.

Visi RPJMN 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk itu, pembangunan membutuhkan reformasi penuh (Comprehensive Reform) yang dilaksanakan bukan dengan cara biasa, dengan prinsip berkelanjutan dan dengan keterpaduan upaya dari berbagai kalangan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.

Terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita), diantaranya yang menjadi isu penting bagi rencana kerja BPKAD Provinsi Riau yaitu :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Hal ini akan diinterpretasikan dalam bentuk perbaikan regulasi-regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, akuntabilitas dan transparansi penyusunan anggaran daerah, penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual, serta pengembangan sistim informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Hal ini akan didukung melalui upaya peningkatan kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah, peningkatan sistem pengendalian internal dan penerapan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas, peningkatan asistensi dan supervisi dengan instansi terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi.

Didalam menunjang Kebijakan Nasional berkenaan dengan prioritas pembangunan nasional, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD);
2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Pengendalian Anggaran Belanja SKPD;
4. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
5. Pelaksanaan pengelola kekayaan daerah;
6. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
7. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kab/kota, badan layanan umum daerah dan badan usaha milik daerah;
8. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa kebijakan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|
| 1. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas | 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1. Meningkatkan <i>capacity building</i> aparatur dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dan pengelolaan aset | 1. meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan secara berkesinambungan melalui diklat berbasis kompetensi |
| | | 2. Peningkatan integritas, kompetensi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah | 1. Pelaksanaan pola kerja yang berbasis kinerja serta menerapkan reward dan punishment. 2. Meningkatkan standar moral aparatur pengelola keuangan melalui penyempurnaan kode etik (code of conduct) |
| | | 3. Optimalisasi tugas dan fungsi seluruh bagian di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 1. Menyempurnakan dan menerapkan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) 2. Pembenahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>) |
| | | 4. 4.Meningkatnya efektivitas dan kualitas mutu layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik | 1. Penyediaan dukungan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai 2. Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Eksekutif dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | 5. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (<i>performance based budgeting</i>), anggaran terpadu (<i>unified budgeting</i>) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (<i>Medium</i> | 1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <i>Term Expenditure Framework / MTEF)</i> | 2. Perumusan kebijakan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DPA sesuai performance based budgeting, unified budgeting dan MTEF. |
| | | 6. Penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual (<i>Accrual basis budgeting</i>) | 1. Penyempurnaan format APBD yang mengacu kepada statistik keuangan pemerintah (<i>Government Finance Statistics/GFS</i>) dan Bagan Akun Standar |
| | | 7. Peningkatan kualitas rencana penarikan dana | 1. Meningkatkan konsistensi pencairan dana yang tepat waktu yang selaras dengan perencanaan anggaran kas, otorisasi SPD dan rencana penerimaan kas 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas penyerapan dana yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja |
| | | 8. Penataan Rekening kas daerah dan SKPD dalam kerangka TSA (<i>treasury single account</i>) framework. | 1. Mendorong sistem pencairan dana anggaran dengan sistem <i>Treasury Single Account (TSA)</i> 2. Mendorong penerapan <i>fully electronic transaction</i> dengan melibatkan perbankan dan institusi terkait (BPK), baik di bidang pengeluaran maupun penerimaan negara. |
| | | 9. Meningkatkan kapasitas sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan SKPD dan kabupaten/Kota | 1. Melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan secara periodik 2. Merumuskan <i>reward and punishment</i> terkait penyampaian |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | laporan keuangan |
| | | 10. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pembimbingan dan koordinasi terkait pengelolaan anggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dengan metode-metode yang efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 2. Perumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah |
| | | 11. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) 2. Penerapan <i>Treasury Single Account</i> (TSA) |
| | | 12. Implementasi sistem akuntansi basis akrual dalam penyusunan anggaran, penatausahaan/ perbendaharaan dan pelaporan keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyusunan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pengelolaan kekayaan daerah, BUMD, BLUD dan pemberian bantuan keuangan 2. Review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan keuangan beserta pedoman teknis |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | pelaksanaannya; |
| | | 13. penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja keuangan daerah; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan sistem informasi dan <i>data base</i> yang berkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal di daerah 2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan dokumen keuangan keuangan yang lebihdipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan |
| | 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota | 1. Pelaksanaan evaluasi APBD/PAPB dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis Teknologi Informasi | 1. Meningkatkan pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah; |
| | | 2. Meningkatkan pelaksanaan asistensi dan fasilitasi PPK-BLUD, pelaksanaan bantuan keuangan provinsi kepada kab/kota dan pemerintah desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah melalui asistensi dan pemberian bimbingan teknis 2. Perumusan kebijakan dan produk hukum daerah terkait pemberian bantuan keuangan |
| | | 3. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBD/PAPBD, LKPD dan pertanggungjawaban pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel 2. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan kab/kota |

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2019-2024. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan ;
2. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
3. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal;
4. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah belum optimal;
5. Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis;
6. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal;
7. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan *treasury single account/TSA*, belum optimal;
8. Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota belum optimal.
9. Pengelolaan barang milik daerah masih harus dioptimalkan sesuai dengan azas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset berbasis teknologi informasi;
4. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel serta memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai;
5. Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi keuangan dan aset daerah kabupaten/kota;
6. Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan pelayanan prima;
3. Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja;
4. Meningkatkan pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis teknologi informasi yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi;
6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
9. Terasilitasinya pengelolaan keuangan dan aset daerah kab/kota;
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah kab/kota.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|---|---|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | |
| 1 | Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas | Persentase APBD/APBD-P SKPD Provinsi Riau sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Penatausahaan Keuangan Provinsi Riau sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--|--|---|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | |
| | | | Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota yang berkualitas | Persentase penyampaian APBD/APBD-P Kab/Kota tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk periode 2020, adalah sebagai berikut:

1. Program Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
2. Program Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
3. Program Belanja Tidak Terduga;
4. Program Bantuan Hibah BOS;
5. Program Bantuan Hibah Lainnya;
6. Program Bantuan Sosial;
7. Program Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
10. Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah;

3.3.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya organisasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Penyusunan rencana kegiatan BPKAD T.A 2020 tidak sepenuhnya berpatokan pada nomenklatur kegiatan dan pagu anggaran yang tercantum pada daftar Program/Kegiatan RKPD, dimana RKPD merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan per program serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Riau

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | | |
|-----------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | |
| | Belanja Daerah | | | | 17.066.847.640 | | | | 18.825.340.480 | | |
| | Belanja Langsung | | | | 17.066.847.640 | | | | 18.825.340.480 | | |
| 02 | 02 | 01 | | Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase layanan administrasi yang baik | | 100 persen | 7.544.749.000 | | 8,198,900,000 | |
| | | | | Kegiatan : | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | Provinsi Riau | 500 Surat | 21.000.000 | APBD Provinsi Riau | 550 surat | 23.100.000 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Jumlah rekening yang dibayar | Pekanbaru | 48 Rekening | 804.000.000 | APBD Provinsi Riau | 48 Rekening | 931.700.000 |
| 02 | 02 | 01 | 004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Pekanbaru | 12 Bulan | 326,075,000 | APBD Provinsi Riau | 12 Bulan | 378,400,000 |
| 02 | 02 | 01 | 006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Pekanbaru | 21 Unit | 347.407.000 | APBD Provinsi Riau | 25 Unit | 462.000.000 |
| 02 | 02 | 01 | 007 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan | Pekanbaru | 66 Jenis | 828.640.000 | APBD Provinsi Riau | 66 Jenis | 900.000.000 |
| 02 | 02 | 01 | 008 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan | Pekanbaru | 25 Jenis | 534.100.000 | APBD Provinsi Riau | 25 Jenis | 578.200.000 |
| 02 | 02 | 01 | 009 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Pekanbaru | 20 Jenis | 62.750.000 | APBD Provinsi Riau | 20 Jenis | 69.000.000 |
| 02 | 02 | 01 | 010 | Penyediaan Makanan Dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | Pekanbaru | 13.769 Porsi | 354.000.000 | APBD Provinsi Riau | 14.000 Porsi | 402,600,000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-----------------|---|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 02 02 01 011 | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Dalam dan luar Provinsi Riau | 500 Kali | 1,050,000,000 | APBD Provinsi Riau | | 520 Kali | 1,155,000,000 |
| 02 02 01 012 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor | Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan | Pekanbaru | 77 Orang | 2.944.500.000 | APBD Provinsi Riau | | 77 Orang | 3.000.000.000 |
| 02 02 01 013 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah tenaga satpam yang disediakan | Pekanbaru | 8 Tenaga Keamanan | 233.600.000 | APBD Provinsi Riau | | 10 Tenaga Keamanan | 256.900.000 |
| 02 02 01 037 | Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD | Provinsi Riau | 6 KIB | 38.677.000 | APBD Provinsi Riau | | 6 KIB | 42.000.000 |
| 02 02 02 | Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja | | 100 persen | 1.035.675.000 | | | 100 persen | 1.313.500.000 |
| | Kegiatan : | | | | | | | | |
| 02 02 02 006 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan | Pekanbaru | 5 Unit, 1 Set | 75.000.000 | APBD Provinsi Riau | | 5 Unit, 1 Set | 82.500.000 |
| 02 02 02 007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Pekanbaru | 30 Unit | 336.475.000 | APBD Provinsi Riau | | 40 Unit | 450.000.000 |
| 02 02 02 009 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | Pekanbaru | 54 Unit | 344.200.000 | APBD Provinsi Riau | | 60 Unit | 473,000,000 |
| 02 02 02 016 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Pekanbaru | 263 Unit | 280.000.000 | APBD Provinsi Riau | | 275 Unit | 308.000.000 |
| 0 02 16 | Program : Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas | | 100 persen | 6.192.946.740 | | | 100 persen | 6,797,010,480 |
| | Kegiatan : | | | | | | | | |
| 0 02 16 002 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P) | Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS Perubahan APBD | Provinsi Riau | 12 Dokumen | 467.492.000 | APBD Provinsi Riau | | 12 Dokumen | 504.000.000 |
| 0 02 16 003 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran APBD | Provinsi Riau | 10 Dokumen | 853.592.000 | APBD Provinsi Riau | | 10 Dokumen | 960.500.000 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|------|----|----|-----|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 0 | 02 | 16 | 004 | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan | Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah | Provinsi Riau | 10 Dokumen | 110.360.000 | APBD Provinsi Riau | | 10 Dokumen | 121.000.000 |
| 0 | 02 | 16 | 005 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Provinsi Riau | 2 Dokumen | 873.089.000 | APBD Provinsi Riau | | 2 Dokumen | 960.500.000 |
| 0 | 02 | 16 | 006 | Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah | Jumlah regulasi yang disusun; Jumlah peserta desminasi dan sosialisasi; | Pekanbaru | 2 Regulasi, 130 Orang | 335.485.000 | APBD Provinsi Riau | | 2 Regulasi, 130 Orang | 350.000.000 |
| 0 | 02 | 16 | 010 | Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD | Jumlah Peserta Koordinasi dan Evaluasi Anggaran BLUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau | Provinsi Riau | 120 Peserta | 197.456.000 | APBD Provinsi Riau | | 120 Peserta | 201.150.000 |
| 0 | 02 | 16 | 012 | Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai | Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai | Provinsi Riau | 300 Orang | 132.445.000 | APBD Provinsi Riau | | 300 Orang | 165.000.000 |
| 0 | 02 | 16 | 013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah | Jumlah laporan data penerimaan daerah | Provinsi Riau | 12 Laporan | 216.006.000 | APBD Provinsi Riau | | 12 Laporan | 232.000.000 |
| 0 | 02 | 16 | 016 | Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua | Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan | Provinsi Riau | 2 Buku, 100 Orang, 7 Orang, 6 Dokumen | 209.244.740 | APBD Provinsi Riau | | 2 Buku, 100 Orang, 7 Orang, 6 Dokumen | 229.488.480 |
| 0 | 02 | 16 | 017 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun | Provinsi Riau | 6 Dokumen | 521.214.000 | APBD Provinsi Riau | | 6 Dokumen | 573.428.000 |
| 0 | 02 | 16 | 018 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | Provinsi Riau | 16 Laporan | 408.686.000 | APBD Provinsi Riau | | 16 Laporan | 448.686.000 |
| 0 | 02 | 16 | 020 | Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi | Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor | Provinsi Riau | 43 Entitas Akuntansi | 191.332.000 | APBD Provinsi Riau | | 43 Entitas Akuntansi | 209.300.000 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-----------|-----------|-----------|-----|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-----------------|---|----------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 02 | 02 | 16 | 024 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi; | Provinsi Riau | 12 Kab/Kota dan Lembaga Penerima Bantuan | 121.174.000 | APBD Provinsi Riau | | 12 Kab/Kota dan Lembaga Penerima Bantuan | 132.154.000 |
| 02 | 02 | 16 | 025 | Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi | Provinsi Riau | 3 Aplikasi | 745.403.000 | APBD Provinsi Riau | | 3 Aplikasi | 819.900.000 |
| 02 | 02 | 16 | 026 | Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Provinsi Riau | 420 Orang,24 SK Gubernur | 480.172.000 | APBD Provinsi Riau | | 420 Orang,24 SK Gubernur | 528.254.000 |
| 02 | 02 | 16 | 027 | Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Provinsi Riau | 1 Kali Rakor,12 SK Gubernur ttg Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota,12 Kab/Kota | 329.796.000 | APBD Provinsi Riau | | 1 Kali Rakor,12 SK Gubernur ttg Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota,12 Kab/Kota | 361.650.000 |
| 02 | 02 | 17 | | Program : Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah | Persentase Pengelolaan Aset Daerah Yang Berkualitas | | 100 persen | 2.293.476.900 | | | 100 persen | 2,515,930,000 |
| | | | | Kegiatan : | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 17 | 001 | Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | 1 Keputusan | 219.108.000 | APBD Provinsi Riau | | 1 Keputusan | 240.500.000 |
| 02 | 02 | 17 | 002 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD | Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD | Provinsi Riau | 1 Dokumen Keputusan Kepala Daerah | 119.033.000 | APBD Provinsi Riau | | 1 Dokumen Keputusan Kepala Daerah | 138.660.000 |
| 02 | 02 | 17 | 003 | Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD | Pekanbaru | 7 Dokumen | 127.300.000 | APBD Provinsi Riau | | 7 Dokumen | 139.590.000 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------|----|----|-----|---|--|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 02 | 02 | 17 | 004 | Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Provinsi Riau | 6 Buku | 341.746.000 | APBD Provinsi Riau | | 6 Buku | 375.000.000 |
| 02 | 02 | 17 | 005 | Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah | Provinsi Riau | 2 Laporan Semesteran, 1 Laporan Tahunan | 105.938.000 | APBD Provinsi Riau | | 2 Laporan Semesteran, 1 Laporan Tahunan | 115.980.000 |
| 02 | 02 | 17 | 008 | Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum | Provinsi Riau | 6 Jenis BMD | 298.106.000 | APBD Provinsi Riau | | 6 Jenis BMD | 317.500.000 |
| 02 | 02 | 17 | 009 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara | Provinsi Riau | 6 Lokasi | 371.191.900 | APBD Provinsi Riau | | 6 Lokasi | 408.000.000 |
| 02 | 02 | 17 | 010 | Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau | Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan; Jumlah lokasi BMD yang ditertibkan; | Provinsi Riau | 3 Jenis BMD, 3 Lokasi | 167.900.000 | APBD Provinsi Riau | | 3 Jenis BMD, 3 Lokasi | 183.950.000 |
| 02 | 02 | 17 | 011 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi | Provinsi Riau | 12 Dokumen | 345.636.000 | APBD Provinsi Riau | | 12 Dokumen | 379.600.000 |
| 02 | 02 | 17 | 012 | Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau | Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi | Provinsi Riau | 3 Jenis BMD | 96.300.000 | APBD Provinsi Riau | | 3 Jenis BMD | 105.900.000 |
| 02 | 02 | 17 | 013 | Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah peserta | Provinsi Riau | 250 Peserta | 101.218.000 | APBD Provinsi Riau | | 250 Peserta | 111.250.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 17.066.847.640 | | | | 18.825.340.480 |

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju 2021

OPD : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.00.02. | KEUANGAN | | | | 17.066.847.640 | | | | 18.825.340.480 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase layanan administrasi yang baik | | 100 persen | 7.544.749.000 | | | | 8.198.900.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | Provinsi Riau | 500 Surat | 21.000.000 | APBD Provinsi Riau | | 550 surat | 23.100.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Jumlah rekening yang dibayar | Pekanbaru | 48 Rekening | 804.000.000 | APBD Provinsi Riau | | 48 Rekening | 931.700.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.004. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Pekanbaru | 12 Bulan | 326,075,000 | APBD Provinsi Riau | | 12 Bulan | 378,400,000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.006. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Pekanbaru | 21 Unit | 347.407.000 | APBD Provinsi Riau | | 25 Unit | 462.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.007. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan | Pekanbaru | 66 Jenis | 828.640.000 | APBD Provinsi Riau | | 66 Jenis | 900.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.008. | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan | Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan | Pekanbaru | 25 Jenis | 534.100.000 | APBD Provinsi | | 25 Jenis | 578.200.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|----------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Riau | | | |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.009. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Pekanbaru | 20 Jenis | 62.750.000 | APBD Provinsi Riau | | 20 Jenis | 69.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.010. | Penyediaan Makanan Dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | Pekanbaru | 13.769 Porsi | 354.000.000 | APBD Provinsi Riau | | 14.000 Porsi | 402,600,000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.011. | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Dalam dan luar Provinsi Riau | 500 Kali | 1,050,000,000 | APBD Provinsi Riau | | 520 Kali | 1,155,000,000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.012. | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor | Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan | Pekanbaru | 77 Orang | 2.944.500.000 | APBD Provinsi Riau | | 77 Orang | 3.000.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.013. | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah tenaga satpam yang disediakan | Pekanbaru | 8 Tenaga Keamanan | 233.600.000 | APBD Provinsi Riau | | 10 Tenaga Keamanan | 256.900.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.01.037. | Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD | Provinsi Riau | 6 KIB | 38.677.000 | APBD Provinsi Riau | | 6 KIB | 42.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.00.02.3.00.02.02.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja | | 100 persen | 1.035.675.000 | | | 100 persen | 1.313.500.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.02.006. | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan | Pekanbaru | 5 Unit, 1 Set | 75.000.000 | APBD Provinsi Riau | | 5 Unit, 1 Set | 82.500.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.02.007. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Pekanbaru | 30 Unit | 336.475.000 | APBD Provinsi Riau | | 40 Unit | 450.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.02.009. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | Pekanbaru | 54 Unit | 344.200.000 | APBD Provinsi Riau | | 60 Unit | 473,000,000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.02.016. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Pekanbaru | 263 Unit | 280.000.000 | APBD Provinsi Riau | | 275 Unit | 308.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16. | Program Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas | | 100 persen | 6.192.946.740 | | | 100 persen | 6.797.010.480 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.002. | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P) | Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS Perubahan APBD | Provinsi Riau | 12 Dokumen | 467.492.000 | APBD Provinsi Riau | | 12 Dokumen | 504.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.003. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH | Provinsi Riau | 10 Dokumen | 853.592.000 | APBD Provinsi | | 10 Dokumen | 960.500.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | KDH tentang Penjabaran APBD | tentang Penjabaran APBD | | | | Riau | | | |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.004. | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan | Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah | Provinsi Riau | 10 Dokumen | 110.360.000 | APBD Provinsi Riau | | 10 Dokumen | 121.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.005. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Provinsi Riau | 2 Dokumen | 873.089.000 | APBD Provinsi Riau | | 2 Dokumen | 960.500.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.006. | Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah | Jumlah regulasi yang disusun; Jumlah peserta desminasi dan sosialisasi; | Pekanbaru | 2 Regulasi, 130 Orang | 335.485.000 | APBD Provinsi Riau | | 2 Regulasi, 130 Orang | 350.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.010. | Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD | Jumlah Peserta Koordinasi dan Evaluasi Anggaran BLUD Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau | Provinsi Riau | 120 Peserta | 197.456.000 | APBD Provinsi Riau | | 120 Peserta | 201.150.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.012. | Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai | Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai | Provinsi Riau | 300 Orang | 132.445.000 | APBD Provinsi Riau | | 300 Orang | 165.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.013. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah | Jumlah laporan data penerimaan daerah | Provinsi Riau | 12 Laporan | 216.006.000 | APBD Provinsi Riau | | 12 Laporan | 232.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|----------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.016. | Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua | Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan | Provinsi Riau | 2 Buku,100 Orang,7 Orang, 6 Dokumen | 209.244.740 | APBD Provinsi Riau | | 2 Buku,100 Orang,7 Orang, 6 Dokumen | 229.488.480 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.017. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun | Provinsi Riau | 6 Dokumen | 521.214.000 | APBD Provinsi Riau | | 6 Dokumen | 573.428.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.018. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | Provinsi Riau | 16 Laporan | 408.686.000 | APBD Provinsi Riau | | 16 Laporan | 448.686.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.020. | Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi | Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor | Provinsi Riau | 43 Entitas Akuntansi | 191.332.000 | APBD Provinsi Riau | | 43 Entitas Akuntansi | 209.300.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.024. | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi; | Provinsi Riau | 12 Kab/Kota dan Lembaga Penerima Bantuan | 121.174.000 | APBD Provinsi Riau | | 12 Kab/Kota dan Lembaga Penerima Bantuan | 132.154.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.025. | Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi | Provinsi Riau | 3 Aplikasi | 745.403.000 | APBD Provinsi | | 3 Aplikasi | 819.900.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Riau | | | |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.026. | Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Provinsi Riau | 420 Orang,24 SK Gubernur | 480.172.000 | APBD Provinsi Riau | | 420 Orang,24 SK Gubernur | 528.254.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.16.027. | Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Provinsi Riau | 1 Kali Rakor,12 SK Gubernur ttg Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota, 12 Kab/Kota | 329.796.000 | APBD Provinsi Riau | | 1 Kali Rakor,12 SK Gubernur ttg Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota,12 Kab/Kota | 361.650.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17. | Program : Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah | Persentase Pengelolaan Aset Daerah Yang Berkualitas | | 100 persen | 2.293.476.900 | | | 100 persen | 2.515.930.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.001 | Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau | Pekanbaru | 1 Keputusan | 219.108.000 | APBD Provinsi Riau | | 1 Keputusan | 240.500.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.002 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD | Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD | Provinsi Riau | 1 Dokumen Keputusan Kepala Daerah | 119.033.000 | APBD Provinsi Riau | | 1 Dokumen Keputusan Kepala Daerah | 138.660.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.003 | Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD | Pekanbaru | 7 Dokumen | 127.300.000 | APBD Provinsi Riau | | 7 Dokumen | 139.590.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.004 | Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Provinsi Riau | 6 Buku | 341.746.000 | APBD Provinsi Riau | | 6 Buku | 375.000.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.005 | Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah | Provinsi Riau | 2 Laporan Semesteran, 1 Laporan Tahunan | 105.938.000 | APBD Provinsi Riau | | 2 Laporan Semesteran, 1 Laporan Tahunan | 115.980.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.008 | Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum | Provinsi Riau | 6 Jenis BMD | 298.106.000 | APBD Provinsi Riau | | 6 Jenis BMD | 317.500.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.009 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara | Provinsi Riau | 6 Lokasi | 371.191.900 | APBD Provinsi | | 6 Lokasi | 408.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Riau | | | |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.010 | Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau | Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan; Jumlah lokasi BMD yang ditertibkan; | Provinsi Riau | 3 Jenis BMD, 3 Lokasi | 167.900.000 | APBD Provinsi Riau | | 3 Jenis BMD, 3 Lokasi | 183.950.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.011 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi | Provinsi Riau | 12 Dokumen | 345.636.000 | APBD Provinsi Riau | | 12 Dokumen | 379.600.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.012 | Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau | Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi | Provinsi Riau | 3 Jenis BMD | 96.300.000 | APBD Provinsi Riau | | 3 Jenis BMD | 105.900.000 |
| 3.00.02.3.00.02.02.17.013 | Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah peserta | Provinsi Riau | 250 Peserta | 101.218.000 | APBD Provinsi Riau | | 250 Peserta | 111.250.000 |
| TOTAL | | | | | 17.066.847.640 | | | | 18.825.340.480 |

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra 2019 – 2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Riau maupun dengan instansi terkait lainnya.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pejabat dan aparatur di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

LAMPIRAN